

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan teknik perencanaan dalam mensukseskan tujuan dalam segala aktifitas, baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi maupun yang lainnya. Kemudian, seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang manajemen, kata strategi yang biasa di gunakan organisasi *profit* dan *non profit*, sering digabungkan dengan perencanaan strategi maupun manajemen strategi. Perencanaan strategi dimaknai rancangan yang bersifat sistemik dilingkungan sebuah organisasi. Sedangkan manajemen strategi mempunyai definisi yang berbeda-beda (Arifin, 2011: 235).

Menurut *Webster's Third New International Dictionary* dijelaskan bahwa strategi adalah ilmu dan seni tentang penggunaan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, psikologi, dan militer satu bangsa atau kelompok bangsa-bangsa yang memungkinkan dukungan maksimal kepada kebijakan yang telah ditetapkan, baik saat damai maupun saat perang. Sedangkan menurut Mizberg menjelaskan bahwa konsep strategis dapat diartikan dengan perencanaan (*to plan*), pengarahan (*direction*), maupun tindakan pokok di masa mendatang.

Lebih spesifik, strategi dalam hal ini dapat diartikan dengan tanggapan suatu organisasi terhadap suatu organisasi terhadap lingkungan (Shadily, 2003:374).

Berdasarkan beberapa definisi peranan menurut para ahli tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau langkah yang mendasar untuk menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dan memperlihatkan kendala atau pilihan yang diarahkan mencapai tujuan organisasi.

Pandangan strategi menurut Donald C. Hambrick dan James W. Fredrickson strategi adalah pusat, integrasi konsep yang beorientasi secara eksternal bagaimana perusahaan mencapai tujuannya. Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Untuk itu diperlukan adanya pengetahuan serta keahlian yang memadai dalam rangka tujuan organisasi (Arifin, 2011:236).

Menurut Von Clausewitz menjelaskan bahwa tujuan strategi bukanlah merupakan kemenangan yang nampak di permukaan, melainkan kedamaian yang terletak di belakangnya. Perencanaan ini sangatlah penting bagi perencanaan strategi politik. Jadi yang terpenting di sini adalah mengenali yang tersembunyi di balik tujuan akhir kemenangan pemilu, atau apa yang direncanakan dengan pemberlakuan peraturan baru. Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan yaitu kemenangan. Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya dalam perolehan tambahan suara. Dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidatnya atau dalam mayoritas bagi suatu

peraturan. Bagaimana kemenangan tersebut digunakan merupakan tujuan politik yang ada di balik kemenangan yang nampak (Laila, 1994:53).

2. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi mampu membentuk kemampuan berfikir dan bertindak secara strategis bagi orang-orang penting pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Perencanaan strategi bukanlah tujuan dalam perencanaan strategi itu sendiri, karena perencanaan strategi hanyalah merupakan kumpulan konsep untuk membantu para pemimpin membuat keputusan penting dan melakukan tindakan penting bagi keberlangsungan dan kejayaan organisasi (Arifin, 2011: 237).

Perencanaan strategis lebih menggambarkan aktifitas periodik yang dilakukan oleh organisasi untuk mengatasi perubahan-perubahan lingkungan eksternal. Di satu sisi perlu juga mengidentifikasi faktor internal. Kedua faktor ini akan memberikan dasar lahirnya keputusan yang strategis, yakni dengan cara menangkap peluang yang ada dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengurangi kelamhan dan mengatasi ancaman (Haryanto, 1984:61).

Secara garis besar perencanaan strategis merupakan pernyataan maksud dan tujuan suatu organisasi serta sumberdaya yang digunakan dan cara pencapaian tugas dan tujuan tersebut. Dalam bidang kearsipan, perencanaan strategis berarti memusatkan perhatian pada visi kearsipan yang diinginkan. Artinya ke arah mana kearsipan itu dikembangkan, bagaimana caranya, kendala apa yang

dihadapi, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana agar pengguna arsip dapat memanfaatkannya secara efektif dan efisien.

B. Konsep Strategi Komunikasi Politik

1. Pengertian Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi yang merupakan panduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi (Arifin, 2011: 236).

Tujuan sentral strategi komunikasi menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu: *to secure understanding* adalah memastikan komunikan mengerti pesan yang diterimanya. Jika sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimaannya itu harus dibina (*to establish acceptance*). Pada akhirnya kegiatan dimotivasikan (*to motivate action*) (Arifin, 2011:241).

2. Langkah-Langkah Strategi Komunikasi Politik

Dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Akan lebih baik apabila dalam strategi itu diperhatikan

komponen-komponen komunikasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen tersebut. Menurut Budiardjo menjelaskan langkah-langkah strategi komunikasi sebagai berikut:

- a. Mengamati permasalahan ketokohan dan kelembagaan
Merupakan gabungan dari aktivitas-aktivitas seperti meneliti, mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap serta perilaku masyarakat terhadap tokoh yang memiliki kepentingan politik dan kelembagaan konsolidasi pendukung tokoh politik. Sehingga berpedoman pada karakter publik atau masyarakat. Ini merupakan pengetahuan dasar dari strategi komunikasi yang akan diimplementasikan.
- b. Perencanaan dan pembuatan program untuk menciptakan kebersamaan
Setelah informasi dan data-data terkumpul, dalam rangka untuk menyusun program, tujuan, tindakan serta strategi komunikasi. Ini dilakukan bila karakteristik masyarakat sudah diketahuinya, karena bagaimanapun perencanaan dan program adalah tahap lanjutan dari tahap pengamatan permasalahan dari kondisi dan situasi khalayak masyarakat.
- c. Mengambil tindakan berkomunikasi dalam upaya membangun konsensus
Pada tahap ini adalah implementasi dari perencanaan dan program yang telah diagendakan secara matang. Bagaimana mendisain seni berkompromi dalam membentuk citra atau *image* seefektif mungkin untuk menarik perhatian masyarakat. Ini dilakukan dalam rangka mengomunikasikan pesan-pesan yang disampaikan secara komunikatif dan bentuk kebersediaan membuka diri kepada masyarakat.

3. Manajemen Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang begitu berperan dalam pemenangan pemilihan umum. Keberhasilan strategi komunikasi politik memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik untuk menyusun tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu. Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya

menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Arifin, 2006:102).

Oleh karena itu, politik dan strategi, kedua hal tersebut harus berjalan beriringan apabila mengejar tujuan berpolitik dalam pemenangan pemilu atau pilkada. Sementara itu strategi juga membutuhkan taktik, prasyarat dalam sebuah perencanaan taktik adalah adanya perencanaan strategi. Perencanaan taktik dan pengambilan tindakan hanya dapat memiliki arti apabila sebuah strategi direncanakan secara teliti. Jadi perencanaan taktik dapat memberikan jawaban atas pertanyaan siapa, akan melakukan apa, kapan, di mana, bagaimana dan mengapa.

Keputusan taktis digunakan untuk mencapai setiap tujuan strategis. Keputusan-keputusan ini terutama tergantung pada pengenalan akan ruang lingkup, kerangka prasyarat, dan kemampuan pribadi. Oleh karena itu, perencanaan taktis hendaknya tidak direncanakan dari tingkat strategis, melainkan oleh pimpinan yang ada di tingkat taktis, karena hanya di sinilah pengetahuan yang dibutuhkan berada.

Secara konsepsi manajemen strategis terdapat bagian-bagian yang penting diketahui, karena ini menjadi modal dasar untuk mengimplementasikan strategi manajemen yang efektif sesuai dengan kondisi dan kontekstual. Model dasar manajemen strategi terdiri dari empat elemen, yaitu:

- a. Mengamati lingkungan. Merupakan mengawasi, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi dari lingkungan eksternal maupun internal untuk keserasian orang dengan perusahaan. Maksudnya yaitu mengidentifikasi

- faktor-faktor strategis dari elemen eksternal maupun internal yang akan menentukan masa depan organisasi.
- b. Formulasi strategi. Mengembangkan rencana jangka panjang untuk efektifitas manajemen dalam menghadapi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi.
 - c. Implementasi Strategi. Sebuah proses di mana strategi dan kebijakan diletakkan ke dalam pelaksanaan melalui pengembangan program, alokasi dan prosedur. Proses ini mencakup ke dalam budaya, struktur, dan sistem manajemen organisasi. Kecuali adanya perubahan yang besar, maka dibutuhkan implementasi strategi yang dilakukan oleh manajer pada kelas bawah dan menengah dengan tinjauan manajer utama.
 - d. Evaluasi dan pengawasan. Sebuah proses di mana hasil aktivitas dan penampilan perusahaan/organisasi diawasi sehingga hasil pencapaian saat ini dapat dibandingkan dengan target pencapaian. Manajer dalam semua level akan menggunakan hasil informasi untuk mengoreksi dan menyelesaikan masalah. Meskipun evaluasi dan kontrol merupakan elemen terakhir dari manajemen strategis (Arifin, 2006:119).

Hal yang penting dari strategi adalah kemampuan untuk melihat manajemen strategis dalam konteks yang lebih luas dan dapat mengisi berbagai peran.

Menurut Grant, strategi digunakan untuk mengisi tiga tujuan manajemen yaitu:

- 1). Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
- 2). Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi strategi tidak hanya dapat digunakan untuk memperoleh konsistensi dalam keputusan yang kita ambil dalam waktu yang berbeda, tetapi, untuk organisasi yang kompleks, strategi dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh konsistensi dalam keputusan yang diambil oleh berbagai departemen dan individu yang ada dalam organisasi.
- 3). Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan akan berada dalam masa yang akan datang. Penempatan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan. Hamel dan Prahalad mengatakan bahwa salah satu elemen strategi yang dimiliki oleh perusahaan yang berhasil adalah apa yang mereka katakan sebagai tujuan strategi-obsesi untuk mencapai kepemimpinan secara global (Arifin, 2006:127).

C. Strategi Pemenangan

Strategi pemenangan politik adalah analisis, perencanaan, implementasi dan kontrol terhadap politik dan program-program pemilihan yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran hubungan yang menguntungkan antara partai dan pemilih demi tujuan untuk mencapai komunikasi politik yang baik. Menurut A. Muis menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik menunjukkan pada pesan sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada hakikatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik (Istyanto, 2011:68).

Menurut Graber memandang bahwa komunikasi politik adalah proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan, struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan komunikasi politik adalah pembicaraan untuk mempengaruhi masyarakat dalam pencitraan, pesan, dialog atau tindakan politik dalam pencitraan menjelang pemilihan (Istyanto, 2011:73).

Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan yaitu “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya dalam perolehan tambahan suara. Dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidatnya atau dalam mayoritas bagi suatu peraturan. Bagaimana kemenangan tersebut

digunakan merupakan tujuan politik yang ada di balik kemenangan yang nampak (Arifin, 2011:235).

Menurut Teori David V.J. Bell dalam Arifin (2011:236) bahwa strategi komunikasi politik yang digunakan untuk memperoleh kemenangan di dalam pemilihan umum kepala daerah antara lain:

1. Ketokohan dan Kelembagaan, dengan indikator:
 - a. Merawat Ketokohan
 - b. Pemantapan Kelembagaan
2. Menciptakan Kebersamaan, dengan indikator:
 - a. Memahami Khalayak
 - b. Menyusun Pesan Persuasif
 - c. Menetapkan Metode
 - d. Memilah dan Memilih Media
3. Membangun Konsensus, dengan indikator:
 - a. Seni Berkompromi
 - b. Bersedia Membuka Diri

Adapun penjelasan Teori David V.J. Bell dalam Arifin (2011:236) mengenai strategi komunikasi politik yang digunakan untuk memperoleh kemenangan di dalam pemilihan umum kepala daerah antara lain:

1). Ketokohan dan Kelembagaan

a). Merawat Ketokohan

Merawat Ketokohan yaitu dengan cara menjaga kepribadian dan nama baiknya di lingkungan masyarakat, menghargai semua lapisan masyarakat, tidak adanya pembedaan status, ikut memikirkan nasib masyarakat, menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, penepatan janji yang tertuang dalam visi-misi, dapat meyakinkan serta mengayomi masyarakat melalui kepercayaan, ketulusan, kejujuran di depan khalayak.

b). Pemantapan Kelembagaan

Pemantapan Kelembagaan yaitu dengan cara pertemuan dengan warga dalam rangka menjalin hubungan emosional, mendengarkan keinginan masyarakat, pertemuan rutin dengan Tim Sukses, konsolidasi Tim Sukses, memantapkan dan mengoptimalkan Tim Sukses pengusung dan elemen pendukung untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.

2). Menciptakan Kebersamaan

a). Memahami Khalayak

Memahami Khalayak yaitu dengan cara memahami karakteristik demografis, sosial, *formal considiation*, partisan *preferences* dan objek politik. Selain itu dalam menciptakan kebersamaan khususnya dalam memahami khalayak dilakukan dengan ikut turun langsung ke masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, mengadakan kegiatan untuk membahas keluhan masyarakat, meningkatkan perekonomian

kerakyatan, mengadakan forum diskusi langsung dengan masyarakat, membuat organisasi untuk menciptakan wadah kepemudaan.

b). Menyusun Pesan Persuasif

Menyusun Pesan Persuasif yaitu dengan cara menciptakan slogan untuk melanjutkan program-program yang belum terealisasikan, menggunakan istilah sesuai dengan visi dan misi kandidat.

c). Menetapkan Metode

Menetapkan Metode yaitu dengan cara melihat dan meneliti kondisi masyarakat dan daerah dengan melakukan survei, kunjungan ke ruang publik.

d). Memilah dan Memilih Media

Memilah dan Memilih Media yaitu dengan cara pendekatan komunikasi melalui media cetak yang terdiri dari Koran, majalah lokal dan media elektronik seperti pesan singkat melalui SMS dan radio. Selain itu pendekatan komunikasi jarak dekat dengan pendekatan secara langsung, komunikasi jarak jauh melalui selebaran, koran, radio, serta optimalisasi layanan pesan singkat dengan menggunakan media elektronik seperti *short messages system (SMS)*, *blackberry messenger group* dan sebagainya.

3). Membangun Konsensus

a). Seni Berkompromi

Seni Berkompromi yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara menyeluruh dan memiliki kesepakatan politik bahwa kandidat

berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik dari periode sebelumnya terhadap masyarakat. Pendekatan juga dilakukan kepada sesepuh yang mengetahui kondisi daerah, perangkat desa dan semua lapisan masyarakat.

b). Bersedia Membuka Diri

Bersedia Membuka Diri yaitu dengan cara *open house* menerima tamu (masyarakat) di rumah, mudah dijumpai di kantor maupun di rumah, tidak ada pembedaan status dan ikut bersosialisasi dengan semua lapisan masyarakat.

Menurut Newman dan Shet menjelaskan bahwa pilihan strategi komunikasi politik untuk merebut dan mempertahankan pasar juga dapat dilakukan dengan memperhatikan citra dan kinerja sebuah kontestan (kandidat atau partai politik). Pilihan strategi dapat dibuat dengan mengembangkan matriks yang menghubungkan citra sebuah kontestan dengan kinerja politiknya setelah terpilih (Arifin, 2011:236).

Menurut Adman Nursal dalam Hertanto (2002:54-73), ada beberapa pendekatan untuk memahami perilaku pemilih, yaitu:

a) Pendekatan sosiologis.

Menurut mahzab Columbia pendekatan sosiologis pada hakikatnya pendekatan berdasarkan karakteristik sosial dan pengelompokan sosial antara lain:

- 1) Profil ketokohan calon politik (latar belakang, pendidikan, pekerjaan, usia, agama, dan sebagainya) dan kelompok pemenangan (Tim Sukses);
- 2) Perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi dengan mengetahui dan memahami khalayak politik dan kekuatan calon politik (calon kandidat);

- 3) Perencanaan dan pembuatan program-program calon politik (calon kandidat);
 - 4) Metode berkomunikasi sosial;
 - 5) Strategi kampanye politik dengan membangun konsensus (sosialisasi dan membuka diri) dan evaluasi program kerja dan sebagainya yang dianggap memberi pengaruh cukup signifikan dalam membentuk perilaku pemilih.
- b) Pendekatan Psikologis.
Menurut mazhab ini, pendekatan terhadap masyarakat agar dalam menentukan pilihannya dalam suatu proses pemilu lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sendiri. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi.
- c) Pendekatan Rasional.
Pendekatan rasional dilakukan dengan penilaian secara valid atas sosialisasi yang disampaikan oleh kandidat. Selain itu, masyarakat rasional diberikan informasi yang cukup sehingga dalam pengambilan keputusan memilih kandidat bukan pada faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan pula untuk kepentingan sendiri, namun untuk kepentingan umum.
- d) Pendekatan Domain Kognitif.
Dalam mengembangkan model tersebut, menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti kelompok masyarakat, komunikasi, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksikan kandidat. Menurut model ini, beberapa domain kognitif sebagai berikut:
- 1) Isu dan kebijakan politik
Merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.
 - 2) Citra sosial (*social imagery*)
Social imagery adalah citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai “berada” di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa seorang kandidat politik.
 - 3) Perasaan emosional
Perasaan emosional adalah dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan yang ditunjukkan oleh *policy* politik yang ditawarkan.
 - 4) Citra Kandidat
Mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.
 - 5) Peristiwa mutakhir
Peristiwa mutakhir mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
 - 6) Peristiwa personal
Peristiwa personal mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seseorang kandidat.
 - 7) Faktor-faktor epistematik
Isu-isu pemilihan spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa antara mazhab sosiologis, mazhab psikologis, dan mazhab ekonomis atau rasional muncul keterkaitan antara satu sama lain yang saling melengkapi. Dalam pendekatan sosiologis pada hakikatnya menekankan pada karakteristik sosial dan pengelompokan sosial yang dianggap memberi pengaruh cukup signifikan dalam membentuk perilaku pemilih.

Dalam penelitian ini, menurut peneliti berdasarkan konsep strategi pemenangan politik adalah perencanaan untuk mencapai komunikasi politik yang baik dalam rangka mempengaruhi masyarakat. Strategi pemenangan Cecep Sofiuddin Ali dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan memiliki relevansi dengan Teori David V.J. Bell, hal ini karena strategi politik yang digunakan Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Merawat ketokohan dan pemantapan kelembagaan yakni Cecep Sofiuddin Ali cukup merawat ketokohan yang dimilikinya di lingkungan masyarakat serta pemantapan kelembagaan konsolidasi Tim Sukses pengusung hal ini juga menjadi kantong suara yang cukup signifikan.
- b) Menciptakan Kebersamaan yakni Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya mampu memahami khalayak khususnya karakteristik demografis, sosial, *formal consideration*, partisan *preferences* dan objek politik masyarakat Desa Way Hui sehingga metode dan media yang diterapkan mampu diterima oleh warga masyarakat Desa Way Hui.

- c) Membangun Konsensus yakni Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya memiliki taktik berkompromi dengan pendekatan secara menyeluruh dan memiliki kesepakatan politik bahwa Cecep Sofiuddin Ali berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik dari periode sebelumnya terhadap masyarakat, selain itu Cecep Sofiuddin Ali juga bersedia membuka diri yakni dengan *open house* kepada khalayak masyarakat tanpa membeda-bedakan status maupun golongan.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut peneliti strategi politik yang digunakan Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya dalam pemenangan Pemilihan Kepala Desa Way Hui memiliki relevansi dengan Teori David V.J. Bell bahwa strategi komunikasi politik yang digunakan untuk memperoleh kemenangan di dalam pemilihan umum kepala daerah antara lain:

1. Ketokohan dan Kelembagaan, dengan indikator:
 - a. Merawat Ketokohan
 - b. Pemantapan Kelembagaan
2. Menciptakan Kebersamaan, dengan indikator:
 - a. Memahami Khalayak
 - b. Menyusun Pesan Persuasif
 - c. Menetapkan Metode
 - d. Memilah dan Memilih Media
3. Membangun Konsensus, dengan indikator:
 - a. Seni Berkompromi
 - b. Bersedia Membuka Diri

D. Tinjauan tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan desa dimana yang mengatur semua kegiatan dalam rumah tangganya sendiri, menerima aspirasi masyarakat, melaksanakan

tugas pemerintahan pusat dan daerah, dan melaksanakan koordinasi dalam rangkaian pelaksanaan pemerintah lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada paragraf 2 menyatakan : Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

Pasal 14, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan 24 peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan “Urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat (Soemantri, 2011:43).

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

Tugas pokok kepala desa adalah Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi kepala desa adalah Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan, Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan, Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan (Soemantri, 2011:49).

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1). Pada tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan pekon seperti, pembuatan peraturan pekon, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Pekon, dan kerjasama antar pekon.

Pada tugas menyelenggarakan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum pekon seperti jalan pekon, jembatan pekon, irigasi pekon, pasar pekon. Pada tugas menyelenggarakan urusan pembangunan kemasyarakatan meliputi pemberdayaan masyarakat Untuk melaksanakan tugas-tugas kepala pekon di

atas, maka Kepala Desa atau Pekon juga mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (2), yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa).
- h. Mewakili di desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Sistem pemilihan Kepala Desa di Indonesia dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat serta mempunyai suara terbanyak. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia hanya kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan presiden dan wakil presiden baru dilaksanakan pada pemilu 2004, hal itu merupakan perkembangan baru dalam pemerintahan Indonesia. Pemilihan Kepala Desa dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik (Kansil, 2005:87).

Pemilihan Kepala Desa memiliki sejarah panjang sejak sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Dengan demikian soal pemilihan Kepala Desa sampai saat ini masih relevan untuk dibahas dan dikaji. Agar mendapat kejelasan yang mendalam perlu mengetahui sejarah perjalanan pemilihan Kepala Desa di Indonesia adalah sebagai berikut :

Periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999:

- a. Berdasarkan konstitusi kerajaan Belanda Tahun 1948 diterbitkanlah *Indische Staatregeling* yang berlaku mulai Tahun 1854, ketentuan mengenai desa diatur dalam pasal 128 :
 - 1) Desa-desa bumiputra dibiarkan memilih kepada anggota pemerintahan desanya sendiri, dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk untuk itu menurut ordonasi. Gubernur jendral menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggaran.
 - 2) Dengan ordonasi dapat ditentukan keadaan dimana kepala desa dan anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu.
 - 3) Kepala desa bumiputra diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jendral, pemerintah wilayah dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonasi.
 - 4) Jika yang ditentukan dalam ayat (1) dan (2) daripasal ini tidak sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan.
 - 5) Dengan ordonasi dapat diatur wewenang dari desa bumiputra untuk :
 - (a) memungut pajak dibawah pengawasan tertentu ;
 - (b) didalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh desa (Soemantri, 2011:64).
- b. Desa diketahui sebagai badan hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan stbl. 1855, untuk menentukan siapa yang berhak menjadi kepala desa, maka rakyat pedesaan memilih sendiri secara langsung kepala desanya. Kemudian dikeluarkan undang-undang yang mengatur tentang kedesaan oleh pemerintah Hindia Belanda (Soemantri, 2011:70).

F. Kerangka Pikir

Pemilihan Kepala Desa terdahulu terlaksana merupakan sarana untuk melakukan pergantian kekuasaan pada tingkatan daerah sebagai syarat untuk meneruskan estafet pemerintah. Model pemilihan langsung rakyat dapat lebih leluasa untuk memilih pemimpin yang disukai sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga ukuran demokratis akan menjadi lebih terlihat dengan model pemilihan tersebut.

Ketentuan situasi Pilkades langsung, masyarakat dihadapkan kepada pilihan-pilihan calon pemimpin yang disukainya, dengan demikian sebuah kompetisi diantara masing-masing calon pemimpin yang berkompetisi akan sangat kuat terjadi didalamnya pada hampir semua aktifitas pada saat menjelang sampai dengan pemilihan.

Pemilihan Kepala Desa menang atau kalah menjadi suatu keniscayaan bagi masing-masing pasangan calon. Strategi menjadi hal yang signifikan dalam penentuan kemenangan pasangan calon yang bertarung dalam arena politik tersebut. Calon untuk masuk dalam bursa pemilihan mempunyai peran yang besar dalam rangka menentukan strategi yang digunakan untuk memenangkan pemilihan.

Bersama pasangan kandidat langkah strategis yang biasa dilakukan oleh partai politik tersebut adalah dengan membentuk tim-tim pemenangan yang akan menjadi pelaksana dari strategi yang telah disusun. Terlepas dari peran yang dimainkan oleh tim-tim pemenangan, pasangan calon juga mempunyai

pengaruh dalam menentukan simpati dari masyarakat dalam rangka mendapat dukungan guna memperoleh suara terbanyak. Untuk meraih simpati dan dukungan tersebut dalam rangka perolehan suara terbanyak, maka diperlukan pemikiran cerdas dan teliti dalam menghasilkan sebuah strategi yang baik.

Dalam penelitian ini, menurut peneliti pada pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, yang muncul sebagai calon terpilih membuktikan bahwa, kemenangan dapat terjadi dari berbagai macam faktor. Menurut peneliti berdasarkan konsep strategi pemenangan politik adalah analisis, perencanaan, implementasi dan kontrol terhadap politik dan program-program pemilihan yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran hubungan yang menguntungkan antara kandidat dan pemilih demi tujuan untuk mencapai komunikasi politik yang baik yakni untuk mempengaruhi masyarakat dalam pencitraan, pesan, dialog atau tindakan politik dalam pencitraan menjelang pemilihan.

Strategi pemenangan Cecep Sofiuddin Ali dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan memiliki relevansi dengan Teori David V.J. Bell, hal ini karena strategi politik yang digunakan Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Merawat ketokohan dan pemantapan kelembagaan yakni Cecep Sofiuddin Ali cukup merawat ketokohan yang dimilikinya di lingkungan masyarakat serta pemantapan kelembagaan konsolidasi Tim Sukses pengusung hal ini juga menjadi kantong suara yang cukup signifikan.
- b) Menciptakan Kebersamaan yakni Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya mampu memahami khalayak khususnya karakteristik demografis, sosial, *formal consideration*, partisan *preferences* dan objek

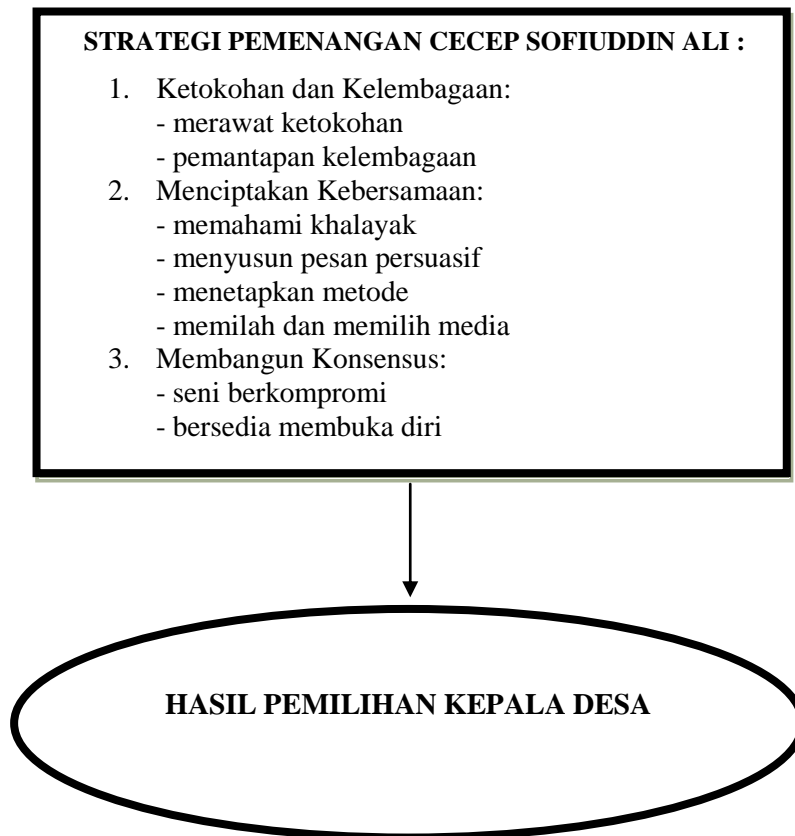
politik masyarakat Desa Way Hui sehingga metode dan media yang diterapkan mampu diterima oleh warga masyarakat Desa Way Hui.

- c) Membangun Konsensus yakni Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya memiliki taktik berkompromi dengan pendekatan secara menyeluruh dan memiliki kesepakatan politik bahwa Cecep Sofiuddin Ali berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik dari periode sebelumnya terhadap masyarakat, selain itu Cecep Sofiuddin Ali juga bersedia membuka diri yakni dengan *open house* kepada khalayak masyarakat tanpa membedakan status maupun golongan.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut peneliti strategi politik yang digunakan Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya dalam kemenangan Pemilihan Kepala Desa Way Hui memiliki relevansi dengan Teori David V.J. Bell bahwa strategi komunikasi politik yang digunakan untuk memperoleh kemenangan di dalam pemilihan antara lain:

1. Ketokohan dan Kelembagaan, dengan indikator:
 - a. Merawat Ketokohan
 - b. Pemantapan Kelembagaan
2. Menciptakan Kebersamaan, dengan indikator:
 - a. Memahami Khalayak
 - b. Menyusun Pesan Persuasif
 - c. Menetapkan Metode
 - d. Memilah dan Memilih Media
3. Membangun Konsensus, dengan indikator:
 - a. Seni Berkompromi
 - b. Bersedia Membuka Diri.

Kerangka Pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir